

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Identitas kebangsaan Thailand dalam karya sastra sudah lama menjadi medan pengarang untuk membantu pemerintah menyebarkan wacana ke-Thai-an, baik di Thailand bagian utara, timur, timur laut dan selatan. Identitas kebangsaan Thailand yang disebarkan ke Thailand selatan umumnya menyentuh isu dan budaya Melayu. Karya sastra yang menyentuh isu budaya dan masyarakat Melayu mendapat perhatian para pengarang Thai yang keturunan Thai-Buddha. Karya sastra yang dihasilkan bertemakan kemelayuan sudah lama ditulis dalam kesusastraan Thailand.

Pernyataan itu dikemukakan oleh Saengthong (2007:234), seorang kritikus sastra Thailand. Menurutnya penulisan sastra Thailand yang membicarakan tentang masyarakat Melayu telah berlangsung semenjak tahun 1937 hingga sekarang. Namun pada tahun 1927-1977 karya-karya itu tidak lebih dari wacana ke-Siam-an. Ia berfungsi melengkapi wacana pembangunan dan demokrasi.

Maksud dari wacana ke-Siam-an ini untuk menuju identitas yang sama sebagai warga masyarakat Thailand. Namun tujuan tersebut justru berpotensi menimbulkan konflik, terutama terkait dengan eksekusi kelompok-kelompok minoritas (Saengthong, 2016: 83). Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Melayu diposisikan terpinggir dan terintimidasi serta budaya Melayu menjadi suatu budaya yang sangat asing dalam budaya Thailand.

Menurut Panaemalae (2007:137-138), sastrawan Thai-Buddha yang menulis tentang masyarakat Melayu selalu mengutamakan representasi budaya Melayu dalam karya sastra mereka. Lebih lanjut Panaemalae mengatakan “mereka terbagi kepada dua golongan; pertama berasal dari daerah di Thailand selatan dan kedua bukan berasal dari Thailand selatan. Golongan pertama adalah mereka mengenal masyarakat Melayu karena bergaul dengan masyarakat Melayu sehari-hari. Hal ini karena ada beberapa daerah di Thailand selatan yang bertetangga dengan perkampungan dan penduduk beragama Buddha. Sementara golongan kedua adalah mereka yang menetap sementara di Thailand selatan karena tugas atau membaca berita-berita dari surat kabar.

Kehadiran pengarang Thai-Buddha di wilayah komunitas Melayu merepresentasikan pandangan tentang masyarakat Melayu, sekaligus mewakili penyampaian suara dan pengalaman yang mereka dapat melihat, merasakan dan menyuarakan isi hati kepada pemerintah melalui karya sastra. Representasi ini menghasilkan dua pandangan ada yang positif dan negatif. Pandangan positifnya, budaya Melayu disebarkan di tengah-tengah wacana sastra Thailand. Dan negatifnya, ada beberapa fakta yang tidak benar disampaikan sehingga justru menyudutkan budaya Melayu. Isu yang sering ditonjolkan berkaitan dengan perbedaan bahasa, agama, makanan, dan pakaian, yang diperkuat oleh wacana yang menggambarkan wilayah Thailand selatan sebagai menakutkan, misterius, dan terbelakang.

Salah satu pengarang yang menghasilkan karya sastra dan mendapat perhatian pengkritik sastra pada dekade 2000-an adalah Siriworn Kaewkan. Di

antara karya-karya sastranya, *กรณีฆาตกรรมโต๊ะอิหม่ามสะตอป่า การ์เด*<sup>1</sup> mendapat perhatian dari para pengkaji sastra dan politik serta menjadi salah satu karya yang paling sering dicetak ulang. Berdasarkan wawancara yang dilakukan Chayaworadet (2022) novel ini merepresentasikan isu-isu di tiga provinsi perbatasan Thailand selatan dengan menyoroti konflik antara kelompok masyarakat tertentu dengan pemerintah pusat.

Novel ini menjadi populer di kalangan ahli sastra Thailand karena menyoroti konflik identitas dan ketegangan politik di Thailand selatan. Karya tersebut merepresentasikan potensi konflik berkelanjutan antara komunitas lokal dan pemerintah pusat, serta mengangkat isu perbedaan budaya dan politik yang mencerminkan dinamika sosial di kawasan tersebut.

Awalnya, karya ini berupa cerpen yang diajukan dalam kompetisi *Phan Waen Fah* tahun 2005 yang diselenggarakan oleh Parlemen Kerajaan Thailand. Namun, cerpen tersebut didiskualifikasi oleh pejabat pemerintah dengan alasan mengganggu keamanan negara, meskipun mendapat penilaian positif dari sebagian juri (Musika, 2014: 48). Seorang juri menyatakan bahwa keputusan memberikan penghargaan terhadap karya ini memicu protes dan intervensi pemerintah, sehingga menimbulkan perdebatan mengenai kebebasan berekspresi.

Menariknya novel tersebut karena merepresentasikan konflik di Thailand selatan melalui berbagai perspektif watak, dengan menekankan perbedaan ras, agama, dan keyakinan. Selain itu, karya ini menampilkan potensi konflik antara

---

<sup>1</sup> Novel ini merupakan karya berbahasa Thailand. Dalam laporan ini, judul novel akan disebut dalam versi terjemahan bahasa Inggris, yakni *The Murder Case of Tok Imam Stopa Karde*, sebagaimana diterjemahkan oleh Marcel Barang.

negara dan kelompok terpinggirkan, sekaligus memperlihatkan ketegangan sosial dan politik yang terjadi di wilayah tersebut.

Kontroversi seputar karya ini mendorong para ahli politik dan sastra mengadakan forum diskusi umum untuk membahas karya ini, yang diselenggarakan oleh berbagai LSM di Thailand Selatan, seperti *Deep South*. Dalam forum tersebut, Siriworn menegaskan bahwa wilayah ini memiliki warisan sejarah yang penting dan identitas budaya yang khas. Didominasi populasi Muslim Melayu yang merupakan latar belakang sebagai bagian dari Kesultanan Patani, serta tantangan dalam proses integrasi nasional menjadi latar kaya bagi eksplorasi sastra. Bagi Siriworn, karyanya dimaksudkan untuk mengungkap kompleksitas identitas dan kebangsaan di kawasan tersebut.

Dalam konteks modern, identitas nasional dipahami sebagai konstruksi sosial yang menegaskan kebersamaan warga negara dengan landasan budaya, sejarah, sosial, dan politik. Elemen-elemen seperti bahasa, tradisi, dan nilai-nilai menjadi penanda kolektif yang membedakan suatu negara dari negara lain, serta berfungsi menumbuhkan rasa kebanggaan dan solidaritas di antara warganya.

Menurut Budianta (2009: 41) sejak era prakolonial, ragam karya sastra yang berkembang di wilayah Nusantara telah berkontribusi dalam membentuk fondasi kebangsaan, baik melalui pemanfaatan bahasa maupun dengan menggali kekayaan budaya lokal. Sastra berperan dalam menumbuhkan rasa kebersamaan dengan merepresentasikan keberagaman wilayah dalam satu kesatuan imajiner bangsa. Melalui narasi fiktif, sastra memungkinkan pembaca merasakan kedekatan sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap identitas kolektif tersebut.

Kajian identitas nasional telah memberikan kontribusi penting untuk memahami konstruksi dan dinamika pembentukannya. Diantara pakar yang membahas identitas nasional adalah Smith (1991: 14) mengatakan bahwa *national identity involves some sense of political community, of belonging to a nation, and of sharing in its culture and history*. (Identitas nasional terbentuk dari suatu komunitas politik, rasa memiliki terhadap suatu bangsa, dan partisipasi dalam budaya dan sejarahnya). Menurut Smith, identitas nasional bukan sekadar hasil kontemporer, melainkan berakar pada warisan historis yang berkembang dari etnisitas, mencakup memori kolektif, mitos asal-usul, budaya bersama, serta keterikatan dengan wilayah tertentu. Menurutnya sebuah bangsa sebagai entitas historis yang terikat pada nilai dan simbol yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Sementara itu, Anderson (1983: 6) melalui konsep *Imagined Community*, mengatakan “*a nation is an imagined political community—and imagined as both inherently limited and sovereign*” (satu bangsa adalah suatu komunitas politik— image sebagai entitas yang terbatas dan berdaulat). Walaupun merupakan komunitas yang tidak saling mengenal secara langsung namun memiliki rasa kebersamaan melalui simbol-simbol bersama, seperti media dan bahasa nasional yang menyatukan identitas kolektif tersebut.

Stuart Hall melengkapi pemahaman ini dengan pendekatan diskursif, di mana identitas nasional dipandang sebagai konstruksi sosial yang dibentuk melalui representasi dan wacana dominan dalam masyarakat. Hall (1996: 612) mengatakan “*national identities are not things we are born with, but are formed and transformed within and in relation to representation*”. (Identitas nasional bukanlah entitas bawaan sejak lahir, melainkan terbentuk dan bertransformasi di dalam serta

dalam relasinya dengan representasi.) Menurut Hall, identitas nasional bersifat cair, selalu dalam proses pembentukan, dan rentan terhadap pergeseran karena pengaruh ideologi dan kekuasaan budaya. Dari pemikiran dari para ahli di atas memberikan kerangka konseptual yang penting dalam membaca identitas nasional sebagai sesuatu yang tidak pernah selesai dan selalu dinegosiasikan.

Dapat disimpulkan dari pendapat Smith, Anderson, dan Hall bahwa identitas nasional bukanlah sesuatu yang bersifat alamiah, melainkan konstruksi sosial yang terbentuk melalui proses sejarah, budaya, dan politik. Smith menyoroti pentingnya warisan etnis, memori kolektif, dan kesinambungan budaya. Anderson menekankan konsep bangsa sebagai *Imagined Community* yang dipersatukan oleh simbol dan narasi kolektif. Sementara Hall melihat identitas nasional sebagai sesuatu yang cair, terbentuk melalui wacana dan relasi kuasa. Kesimpulannya definisi-definisi di atas menunjukkan bahwa identitas nasional adalah hasil dari proses konstruksi yang dinamis dan senantiasa dinegosiasikan.

Identitas nasional berkembang seiring dengan munculnya negara-bangsa modern, terutama di Eropa, dan menyebar secara global melalui kolonialisme. Asalnya terkait dengan transformasi sejarah, budaya, politik, dan ekonomi. Dalam konteks kolonial, kekuatan Eropa sering memaksakan identitas budaya dan politik mereka kepada wilayah jajahan. Sebagai respons, masyarakat terjajah membentuk identitas nasional sendiri melalui gerakan anti-kolonial yang menekankan kemerdekaan, kedaulatan, dan kebangkitan budaya lokal sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi kolonial. Fenomena ini tercermin pada nasionalisme di Malaysia dan Indonesia yang berbeda mengenai identitas nasional. Di Malaysia, musuh nasional dikonstruksi dari luar, khususnya Barat, yang dianggap mengancam

Islam, dan digunakan Mahathir untuk mempersatukan warga Muslim dan non-Muslim. Sebaliknya, Indonesia di bawah Orde Baru memberatkan wacana bahaya ke dalam negeri, dengan Islam sebagai target utama marginalisasi politik. Ketidaksensitifan terhadap isu agama dan etnis memicu konflik antar kelompok. Dalam konteks tersebut, komitmen terhadap Pancasila sebagai dasar negara menjadi instrumen penting untuk menjaga persatuan nasional di tengah keragaman agama, etnis, dan budaya, melalui penegasan konsep satu bahasa, satu bangsa, dan satu negara. (Hamayotsu, 2002: 353-375)

Dalam kerangka ini, identitas nasional berperan strategis sebagai sarana untuk menggalang perlawanan serta memperkuat solidaritas antar kelompok yang sebelumnya terpecah. Namun, dinamika pembentukan identitas nasional juga berpotensi menimbulkan konflik, terutama ketika wacana identitas dominan mengabaikan atau meminggirkan kelompok minoritas, yang dapat memicu ketegangan sosial.

Berbicara mengenai pembentukan identitas bangsa, pembentukan identitas nasional Thailand dimulai pada akhir abad ke-19 melalui modernisasi oleh Raja Rama V, dan diperkuat oleh Marsekal Plaek Phibunsongkhram pada awal abad ke-20. Di bawah kepemimpinan Phibunsongkhram, ideologi tradisional bangsa, agama, dan raja digantikan oleh kultus pemimpin *เชื่อผู้นำชาติพ้นภัย* (Percaya Pemimpin, Bangsa Selamat). Dalam lima tahun kepemimpinannya, terjadi perubahan signifikan termasuk perubahan nama negara dari *Siam* menjadi *Thailand* pada tahun 1939, pembentukan ulang identitas budaya, serta masuknya pengaruh Jepang. Kelemahan konstitusionalisme mendorong Phibunsongkhram membangun

nasionalisme sebagai dasar legitimasi kekuasaannya dan strategi untuk memperkuat dukungan politik. (Krongbhum, 2015: 71)

Menurut Komite Identitas Nasional, identitas nasional didefinisikan sebagai ciri khas yang unik dan dimiliki bersama oleh suatu bangsa, mencakup penduduk, wilayah, kemerdekaan dan kedaulatan, pemerintahan, agama, raja, kebudayaan, serta martabat bangsa. Dalam konteks Thailand, unsur penting dari identitas nasional terletak pada institusi bangsa, agama, dan raja, yang berperan sebagai pilar utama bagi stabilitas nasional. Ketiganya menjaga kesatuan sosial dan politik, membentuk karakter bangsa, serta diyakini mendukung kemajuan, ketertiban, dan kedaulatan negara. Perpaduan elemen-elemen ini menjadi fondasi ketahanan nasional Thailand (Krongbhum, 2015: 72-74).

Proses pembentukan identitas nasional di Thailand menghadapi berbagai tantangan, terutama ketika narasi tunggal budaya nasional mendominasi dan mengabaikan keberagaman internal. Dominasi tersebut berpotensi meminggirkan kelompok etnis minoritas, seperti masyarakat Melayu di perbatasan selatan, sehingga memicu konflik dan ketegangan sosial.

Salah satu dampaknya adalah meningkatnya kekerasan di daerah tersebut. Khususnya pada 2004–2006 di bawah pemerintahan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Pendekatan represif melalui operasi kepolisian, baik terbuka maupun rahasia, justru memperburuk kondisi. Sebagai respons, pemerintahan Jenderal Surayud Chulanont (2006–2007) berupaya menggeser strategi dengan menekankan dialog damai dan mengaktifkan kembali Pusat Administrasi Operasi Provinsi-Provinsi Perbatasan Selatan (SBPAC) sebagai bagian dari agenda rekonsiliasi. (Krongbhum, 2015: 196)

Ketegangan ini menyoroti kesulitan dalam menyatukan masyarakat multikultural di bawah satu wacana identitas nasional. Identitas nasional Thailand dibentuk sebagai respons terhadap proses modernisasi dan tekanan eksternal, dengan tujuan mempertahankan kedaulatan melalui sentralisasi politik dan pelestarian budaya. Namun, pendekatan tersebut berpotensi menimbulkan konflik, terutama ketika wacana nasional yang dominan gagal mengakomodasi keragaman budaya dan aspirasi politik kelompok minoritas. Akibatnya, upaya pemersatuan justru melahirkan ketegangan sosial yang menghambat integrasi dan keadilan bagi seluruh warga negara..

Untuk memahami dinamika di Thailand Selatan, penting melihat struktur demografis negara yang terdiri dari 77 provinsi dan terbagi dalam lima wilayah utama: Utara, Timur, Timur Laut, Tengah, dan Selatan. Di antara wilayah-wilayah ini, Thailand Selatan secara historis mengalami ketertinggalan dalam aspek pembangunan dan pendidikan. Hal ini berkaitan dengan latar belakang sejarah wilayah tersebut, yang dahulu merupakan bagian dari Kesultanan Patani, sebuah entitas Melayu Muslim, sebelum diserahkan Inggris kepada Siam pada tahun 1902. (Syukri, 1985: 44-53) Setelah terintegrasi ke dalam Siam, kebijakan asimilasi budaya dan sentralisasi kekuasaan diterapkan, yang kemudian sering menimbulkan ketegangan antara komunitas Muslim Melayu dan Thai-Buddha.

Identitas budaya Masyarakat Thailand selatan tercermin melalui agama Islam, penggunaan bahasa Melayu, serta norma sosial yang khas dan berbeda dari budaya Thai-Buddha di wilayah tengah. Perbedaan ini membentuk hubungan yang kompleks antara masyarakat Melayu-Muslim dan negara Thailand. Integrasi wilayah Pattani dilakukan melalui strategi sentralisasi, termasuk reformasi

administratif, penggantian elit lokal, dan pemaksaan budaya Thai. Kebijakan seperti penetapan bahasa Thai sebagai bahasa resmi dan promosi nilai-nilai Buddhis bertujuan mengasimilasi masyarakat Melayu-Muslim, namun sering memicu resistensi dari masyarakat karena mengabaikan keragaman budaya.

Menurut Jehwae (2017: 50-51), Thailand selatan terbagi menjadi dua wilayah linguistik, yaitu utara dan selatan. Wilayah utara didominasi oleh penutur bahasa Thai, mencakup provinsi seperti Chumpon, Ranong, Krabi, Pang-nga, Phuket, Nakhon Si Thammarat, dan Surat Thani, yang mayoritas adalah komunitas *non*-Melayu. Sementara wilayah selatan, termasuk Trang, Setul, Pathalung, dan Songkhla, menunjukkan campuran penutur bahasa Thai dan Melayu, dan komunitas Pattani, Yala, serta Narathiwat didominasi oleh bahasa Melayu. Hal ini sesuai dengan pendapat Baru (2003: 215) yang menyatakan bahwa ketiga wilayah tersebut merupakan bagian dari kerajaan Melayu kuno. Di wilayah selatan Thailand, bahasa Melayu digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

International Crisis Group (2005: 2-3) melaporkan bahwa pada periode 1902-1944, pemerintah Thailand memberlakukan sejumlah regulasi represif terhadap komunitas Muslim-Melayu di Selatan. Bahasa Melayu dilarang di kantor pemerintah, pegawai negeri Melayu diwajibkan menggunakan nama Thailand, dan pakaian khas Muslim-Melayu dilarang di ruang publik. Selain itu, praktik hukum Islam turut dilarang, sementara di sekolah-sekolah ditempatkan patung Buddha dan anak-anak Muslim dipaksa untuk bersujud di hadapannya. Kebijakan-kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi asimilasi budaya dan penguatan identitas nasional Thailand.

Aturan tersebut menunjukkan bagaimana represi negara memicu pembentukan gerakan resistensi yang terorganisir, dengan identitas nasional sebagai landasan perjuangan. Puncak represi terjadi pada 1947, ketika penangkapan dan penghilangan Haji Sulong, tokoh penting Muslim-Melayu, memicu protes massa yang berujung pada penangkapan sekitar 400 demonstran. Sebagai respons, pada 1960-an muncul berbagai organisasi perjuangan di luar Thailand, antara lain Front Pembebasan Nasional Patani (BNPP), Barisan Revolusi Nasional (BRN), dan Patani United Liberation Organization (PULO), yang terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Muslim di Thailand Selatan hingga kini. (Thayer, 2007: 7).

Masyarakat di Thailand selatan hingga kini diposisikan sebagai golongan minoritas, dicap oleh pemerintah sebagai kelompok yang tidak fasih berbahasa Thai dan karenanya selalu dicurigai. Umarn (2015: 17) mencatat bahwa perempuan Muslim di tiga provinsi perbatasan selatan, terutama yang berusia 50 tahun ke atas, sering dianggap tidak melek aksara Thai dan tidak mampu berkomunikasi dengan bahasa Thai standar, bahasa Melayu, atau dialek Thai selatan. Stereotip ini menyebabkan mereka menjadi korban dalam pelaksanaan tugas oleh aparat, memperburuk ketegangan sosial antara komunitas Muslim dan pemerintah Thailand.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik menganalisis novel karya Siriworn Kaewkan, seorang novelis Thailand yang konsisten mengangkat tema sosio-politik dan budaya. Novel berjudul *กรณีฆาตกรรมโต๊ะอิหม่ามสตอปาการ์ดร์* (Korani Khattakam Tok Imam Stopa Karde) ditulis pada tahun 2004 dan diterbitkan pada 2006 setelah terjadinya konflik kembali di Thailand selatan. Novel ini terinspirasi dari peristiwa pembunuhan Imam Stopa Yusuf di wilayah

Narathiwat pada 30 Agustus 2005. Sebagai pemimpin agama yang disegani, kematiannya menjadi titik fokus novel yang menggambarkan dinamika konflik di Thailand Selatan.

Novel tersebut mengeksplorasi konflik di provinsi-provinsi selatan Thailand. Novel ini berfokus pada kematian misterius Tok Imam Stopa Karde, seorang pemimpin agama, yang terjadi di sebuah kampung Sungai Padi dekat perbatasan Malaysia. Novel ini memberikan gambaran mendalam tentang ketegangan sosial dan politik yang ada di Thailand Selatan.

Novel ini mencerminkan gaya penulisan Siriwarn yang menggabungkan cerita yang kompleks dengan kritik sosial yang tajam. Narasi-narasinya menggali kedalaman isu identitas, kekuasaan, dan komunitas, serta menyoroti wilayah dan persoalan yang jarang dibahas dalam sastra Thailand modern.

*The Murder Case of Tok Imam Stopa Karde* muncul sebagai eksplorasi mendalam mengenai Thailand Selatan, sebuah wilayah yang dikenal dengan identitas Muslim Melayu yang khusus dan mempunyai sejarah konflik dengan pemerintah pusat Thailand. Dalam hal ini, karya tersebut menjadi representasi naratif dari konflik identitas dan ketegangan kekuasaan yang terus berlangsung di wilayah tersebut, yang berakar pada perbedaan budaya dan sejarah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi identitas nasional Thailand dalam novel *The Murder Case of Tok Imam Stopa Karde* melalui tiga fokus utama. Pertama analisis karakter yang menampilkan beragam aspek identitas nasional dan wacana kebangsaan. Kedua, novel menggambarkan konflik dan ketegangan identitas di Thailand Selatan sebagai bagian dari perjuangan sosio-

politik yang kompleks. Ketiga, novel ini juga mengkritik terhadap kebijakan sentralisasi negara yang memarginalkan komunitas lokal, disajikan melalui pendekatan literer yang reflektif.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana novel *The Murder Case of Tok Imam Stopa Karde* merepresentasikan identitas diri sebagai bagian dari identitas nasional Thailand?
2. Bagaimana novel *The Murder Case of Tok Imam Stopa Karde* menggambarkan konflik identitas nasional Thailand dan menggambarkan negara Thailand menjalankan kebijakan identitas kebangsaan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis identitas nasional Thailand melalui tokoh dan karakter dalam novel *The Murder Case of Tok Imam Stopa Karde* sebagai cerminan identitas Thailand.
2. Memaparkan konflik dan ketegangan serta menjelaskan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah di Thailand selatan yang terdapat dalam novel *The Murder Case of Tok Imam Stopa Karde*.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki signifikansi ganda, baik akademis maupun praktis. Secara akademis, studi ini memperkaya diskursus kritik sastra dengan menyoroti keterkaitannya dengan dinamika sosio-politik di Thailand Selatan, sekaligus menyediakan landasan teoretis bagi penelitian lanjutan. Secara praktis, penelitian ini meningkatkan pemahaman pembaca tentang kompleksitas isu sosio-politik di wilayah tersebut melalui interpretasi sastra, serta menawarkan perspektif yang relevan bagi pengambil kebijakan dalam memahami makna identitas dan konflik yang berkembang di masyarakat.

